

Differences In Tolerance of Students and General Society Based on Religious Identity Politics: A Literature Study

Perbedaan Toleransi Mahasiswa Dan Masyarakat Umum Berdasarkan Politik Identitas Agama: Sebuah Studi Literatur

Dimas Prio Sembodo¹, Nurmina²

^{1,2} Universitas Negeri Padang

Email: dimasembodo@gmail.com

Abstract

Identity politics is inseparable from multicultural society. Identity politics is a form of political method used by various majority and minority groups to achieve the desired ideal political goals. Due to differences in ideal views held between groups, the use of identity politics by majority groups to accommodate political interests often leads to conflict because it threatens the interests of minority groups and vulnerable groups such as religious, ethnic and gender groups. Based on the level of use, identity politics is used at the level of social life up to the level of student life to fulfill various political goals such as attracting votes in the election of leaders and the identity politics that is often used is religious identity politics. The majority of the people of West Sumatra are adherents of the Islamic faith, the use of Islamic identity politics often threatens the existence of other ethnicities and beliefs through sharia regional regulations. In student life, identity politics is related to everyday life, including fulfilling the need to worship according to beliefs and the need for mutual respect between students so that a harmonious multicultural life is achieved. The method that will be used in this research is a literature review, is by analyzing various research articles related to political tolerance and religious identity politics. The results of this research show that there are indications of differences in political tolerance between society and students in West Sumatra related to religious identity politics.

Keyword: *Toleration, Religious Identity Politics*

Abstrak

Politik identitas merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari masyarakat multikultural. Politik Identitas merupakan salah satu bentuk cara berpolitik yang digunakan kelompok mayoritas maupun minoritas untuk mencapai tujuan-tujuan ideal politik yang dikehendaki. Dikarenakan perbedaan pandangan ideal yang dimiliki antar kelompok, penggunaan politik identitas oleh kelompok mayoritas untuk mengakomodasi kepentingan politik sering kali menimbulkan konflik karena mengancam kepentingan kelompok-kelompok minoritas dan kelompok rentan seperti kelompok agama, etnis, maupun gender. Berdasarkan taraf penggunaan, politik identitas digunakan pada tingkatan kehidupan bermasyarakat hingga pada tingkatan kehidupan mahasiswa untuk memenuhi berbagai tujuan politis seperti menarik suara dalam pemilihan pemimpin dan politik identitas yang sering digunakan adalah politik identitas agama. Masyarakat Sumatera Barat mayoritasnya adalah penganut kepercayaan Islam, penggunaan politik identitas islam sering mengancam keberadaan etnis dan kepercayaan lain melalui perda-perda syariah. Pada kehidupan mahasiswa, politik identitas berkaitan dengan kehidupan sehari-hari termasuk pemenuhan kebutuhan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan maupun kebutuhan untuk saling menghormati antar mahasiswa sehingga tercapai kehidupan multikultural yang rukun. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *literature review* yaitu dengan melakukan analisa terhadap berbagai artikel penelitian terkait dengan toleransi politik dan politik identitas agama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi perbedaan pada toleransi politik antara masyarakat dan mahasiswa di Sumatera Barat berkaitan dengan politik identitas agama.

Kata Kunci: *Toleransi, Politik Identitas agama*

PENDAHULUAN

Identitas digunakan dalam berbagai topik penelitian seperti penelitian dalam bidang politik (Fearon, 1999) karena identitas menjadi determinan individu dalam menentukan sikap dalam pergerakan politik (Lestari, 2019). Kebutuhan pada kekhasan identitas mendorong identitas sosial (Tajfel & Turner, 1979) dimana individu mengasosiasikan diri pada kelompok-kelompok (Cottam, Dietz-Uhler, Mastors, & Preston, 2012). Penggunaan identitas dalam pergerakan politik disebut politik identitas. Penggunaan politik identitas tidak terpisahkan dalam masyarakat multikultural. Identitas bersama seperti ras, jenis kelamin, kelas, dan agama digunakan sebagai alat politik dan berbagai pergerakan politik (Lestari, 2019; Hazama, 2010) karena mampu menaikkan elektabilitas tokoh yang berasal dari kalangan mayoritas (Muhtadi, 2018).

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang multikultural. Tercatat bahwa terdapat 1331 kategori suku di Indonesia. Kategori suku ini kemudian dikelompokkan dalam total 633 kelompok suku besar (Statistik, 2015). Indonesia merupakan negara dengan masyarakat dengan penganut agama Islam terbesar didunia berdasarkan survei pada tahun 2010 (Kusnandar, 2019), penggunaan politik identitas Islam digunakan untuk menggerakkan umat Islam dalam memenangkan kepentingan-kepentingan umat Islam dalam ranah elektoral (Anam, 2019; AJi & Yunus, 2019) misalnya penggunaan politik badunsanak (politik kekeluargaan) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di kota Padang (Effendi, 2014) dan penggunaan kampanye negatif berupa penggunaan kasus terkait etnis dan agama untuk mempengaruhi elektabilitas calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta (Hanifia, 2018).

Penggunaan politik identitas oleh kelompok mayoritas mengancam kepentingan kelompok mayoritas dan rentan, karena pada awalnya politik identitas digunakan untuk mengejar kepentingan-kepentingan kelompok minoritas (Romli, 2019) misalnya dalam Trinugraha (Trinugraha, 2013) dan Moh. Rafli Abbas (Abbas, 2016). Konflik karena penggunaan politik identitas terjadi seperti dalam Faucher (Faucher, 2007) dan Haboddin (Haboddin, 2012). Kesadaran akan identitas harus diimbangi dengan budaya toleransi demi tercapainya kedamaian dalam masyarakat multikultural (Hamidah, 2018).

Penggunaan politik identitas oleh kelompok mayoritas mengancam kepentingan kelompok mayoritas dan rentan, karena pada awalnya politik identitas digunakan untuk mengejar kepentingan-kepentingan kelompok minoritas (Romli, 2019; Trinugraha, 2013; Abbas, 2016). Konflik yang terjadi karena penggunaan politik identitas terjadi seperti dalam Faucher (Faucher, 2007) dan Haboddin (Haboddin, 2012). Kesadaran akan identitas harus diimbangi dengan budaya toleransi demi tercapainya kedamaian dalam masyarakat multikultural (Hamidah, 2018).

Identitas mengacu pada kekhasan individu terhadap kelompok atau kategori sosial yang menyiratkan kesamaan, seperti jenis kelamin atau suku bangsa (Dege, 2014). Teori identitas sosial memberikan pandangan klasik psikologi sosial mengenai konflik antar-kelompok berdasarkan pengkategorian diri pada identitas kelompok (Islam, 2014). Tajfel mendefinisikan identitas sosial sebagai bagian dari konsep diri seseorang yang berakar pada wawasan individu tentang keanggotaannya dalam sebuah kelompok sosial, bersama dengan nilai dan signifikansi pada keanggotaannya yang melekat secara emosional (Cottam, Dietz-Uhler, Mastors, & Preston, 2012). Politik identitas mengacu pada bentuk-bentuk pergerakan yang berusaha untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu dengan berlandaskan kekhasan identitas yang dimiliki bersama. Stephany Taylor mendefinisikan politik identitas sebagai identitas pribadi yang ditarik dan ditentukan secara berlebihan yang bertujuan untuk mencapai sebuah kebutuhan khusus dalam kebutuhan politik tertentu (Dege, 2014). Sementara Agnes Haller (Heller, 2001) mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang berfokus pada perbedaan (different) sebagai respon terhadap kegagalan narasi utama (grand narrative) dalam mengangkat kepentingan yang kelompok dan menjanjikan suatu kebebasan (freedom). Dengan demikian, politik identitas adalah mobilisasi politik yang berfokus pada perbedaan dan berlandaskan identitas pribadi secara berlebihan untuk mencapai sebuah tujuan politik tertentu.

Toleransi berasal dari bahasa Inggris 'Tolerance' yang berarti membiarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap atau sifat toleran, mendinginkan, atau membiarkan (KBBI, 2021). Dalam pandangan tradisional, Murphy mendefinisikan toleransi sebagai bentuk abstrak yang berupa sikap untuk mengakui sudut pandang yang berbeda (Abbarno, 2013), meskipun

toleransi merupakan nilai yang berada dalam ruang antara ketidakpedulian dan penerimaan (Oberdiek, 2001).

Dalam pandangan psikologi, toleransi merupakan variabel kontrol sosial dimana seseorang diharapkan memahami perbedaan dalam kehidupan sosial dan berusaha untuk mengendalikan respon negatif terhadap perbedaan tersebut (Dijker & Koomen, 2007). Rivka T. Wittenberg mendefinisikan toleransi dalam psikologi sebagai keadaan seseorang yang mampu mempertimbangkan prasangka (prejudice) dan secara sadar menolak prasangka tersebut atas dasar keadilan (fairness), empati (empathy) dan logika (Wittenberg, 2019). Dalam bidang sosial, Sullivan dan rekan sejawatnya berpendapat bahwa toleransi bermakna saat seseorang menghendaki untuk bersikap toleran terhadap kelompok yang tidak disukai. Ada atau tidaknya sikap toleran adalah sebuah sikap politik yang lebih dahulu didorong oleh emosi dibandingkan kognisi (Cottam, Dietz-Uhler, Mastors, & Preston, 2012).

Toleransi merupakan variabel kontrol sosial berupa sikap dan keinginan seseorang untuk menerima perbedaan dan mengendalikan prasangka terhadap kelompok yang tidak disukai yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan prasangka (prejudice), rasa keadilan (fairness) dan kesadaran atas dasar logika. Sikap-sikap ini berupa sikap menerima sudut pandang yang berbeda, memberikan kebebasan dalam berpendapat dan tidak mendahulukan kepentingan sendiri. Toleransi dilakukan kepada individu atau bagian dari kelompok berbeda dan seringkali merupakan kelompok yang tidak disukai. Sullivan berpendapat bahwa toleransi merupakan suatu posisi politik, seseorang hanya bisa menguji tingkat toleransi dengan cara mengamati atau mengobservasi sikap-sikap terhadap kelompok yang tidak disukai (Cottam, Dietz-Uhler, Mastors, & Preston, 2012).

Sumatera Barat merupakan provinsi yang dinaungi oleh mayoritas masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat etnis yang mayoritasnya merupakan penganut agama Islam. Sebagai arus utama, menggunakan politik identitas Islam seringkali digunakan dalam berbagai pewujudan aturan yang tercermin dalam pembuatan perda-perda syariah (Rahmat, 2011). Dalam ranah lain seperti pemilihan kepala daerah misalnya, salah satu menggunakan politik etnis dalam pemilukada tahun 2010 di Kabupaten Pasaman menimbulkan konflik hingga terjadi kericuhan (Yandra, 2017) dan studi penggunaan politik etnisitas untuk menekan kebijakan investasi melalui Forum Masyarakat Minangkabau yang merupakan penggerak sosial karena ada prasangka bahwa PT. SPL melanggar izin pemanfaatan Ruang Lingkup hingga berhasil membatalakan pembangunan pabrik (Hospita, Zetra, & Afrizal, 2018). Sementara bagi kelompok diluar arus utama kurang memiliki pengaruh maupun wadah politik yang kuat.

Mahasiswa mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan merupakan agen perubahan untuk menggerakkan masyarakat menjadi lebih maju. Kehidupan mahasiswa yang cenderung majemuk dengan bertemu mahasiswa lain dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda ditambah dengan paparan pengetahuan untuk hidup dengan saling menghargai membuat mahasiswa terbiasa berada dalam lingkungan yang majemuk. Dalam kehidupan universitas yang majemuk, toleransi diperlukan agar kedamaian tercapai. Dengan level intelektual, maka mahasiswa seharusnya mampu mengendalikan diri dalam toleransi. Karena itu penelitian ini berfokus pada perbedaan toleransi mahasiswa dan masyarakat berdasarkan politik identitas agama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti memilih fokus untuk meneliti mengenai perbedaan toleransi pada mahasiswa dan masyarakat umum yang dibatasi dalam bidang politik identitas agama.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian menggunakan desain Literature Review. Literature review adalah sebuah bentuk rancangan penelitian yang melibatkan tahapan-tahapan sistematis dan berstruktur yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, lalu melakukan proses penyatuan gagasan (Boote & Beile, 2005) yang berlandaskan pada kerangka konseptual yang terpadu (Fink, 2010) serta mampu mengidentifikasi dan mengisi kesenjangan dari penelitian sebelumnya (Machi & McEvoy, 2016).

Dalam prosesnya, literature review melakukan analisa terhadap sumber literatur untuk menemukan gagasan utama yang menjadi tema penelitian. Mengenali gagasan utama bertujuan untuk menemukan hubungan antar gagasan-gagasan besar dalam literatur. Dari gagasan yang berkaitan, kemudian memahami penggunaan simpulan dari sekumpulan gagasan dalam penelitian dalam bentuk

argumen penelitian (Hart, 1998). Setelah proses penyusunan argumen yang berkaitan, kemudian memposisikan hasil penelitian yang telah ada sebagai penghubung yang mengisi kesenjangan penelitian pada bidang terkait (Ridley, 2012)

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam literature review diawali dengan menentukan tema besar penelitian. Tahapan berikutnya adalah menemukan sumber literatur yang relevan dan melakukan penyeleksian untuk menemukan literatur yang berkaitan. Sumber-sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal teoritis maupun laporan penelitian terkait dengan tema penelitian (Galvan, 2017) yang dikumpulkan melalui media intener dengan menggunakan alat berupa Global Search Engine oleh Google.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perbedaan toleransi mahasiswa dan masyarakat umum berdasarkan politik identitas dagama di kota Padang. Karena itu penelitian ini menentukan variabel yang akan dipakai dalam penelitian yaitu bebas (X) adalah politik identitas agama dan variabel terikat (Y) adalah toleransi. Maka literatur yang menjadi sumber adalah literatur yang berkaitan dengan toleransi dan politik identitas agama.

Tahapan berikutnya adalah melakukan penyeleksian terhadap literatur yang telah terkumpul. Pada tahap ini dilakukan proses analisa untuk mengetahui gagasan utama yang berkaitan dengan tema penelitian (Galvan, 2017) untuk mengumpulkan literatur yang relevan (sorting in) terhadap tema penelitian dan memisahkan dari literatur yang menyimpang dan tidak relevan (sorting out) (Hart, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Iklm sosial dan pendidikan universitas menentukan tingkat toleransi mahasiswa (Ardi, Tobing, Agustina, Iswahyudi, & Budiarti, 2021). Selain pengetahuan, empati menjadi dimensi yang paling berpengaruh dalam toleransi mahasiswa (Azmi & Kumala, 2019). Meski toleransi dan intoleransi sering dimoderasi oleh rasa terancam, namun kecerdasan kognitif berperan dalam membentuk respon sehingga tidak selalu mendasarkan sikap pada emosi-emosi negatif (Hebbelstorp & Rasmussen, 2015). Meskipun bentuk toleransi yang dilakukan cenderung pasif dibandingkan turut aktif dalam praktik-praktik yang bersebrangan (Adelman, Verkuyten, & Yogeewaran, 2022).

Toleransi pada masyarakat umum cenderung dipengaruhi media. Membagikan pengalaman merugikan efektif meningkatkan perilaku dehumanis (Kubin, Gray, & Sikorski, 2023). Selain itu kebahagiaan tak-terduga juga meningkatkan sikap toleran (Tenenbaum, Capelos, Lorimer, & Stocks, 2018). Berbeda dengan agama yang tidak menunjukkan pengaruh jelas terhadap toleransi politik (Peterson, 2020).

Namun rasa keterancaman, fundamentalis, dan prasangka buruk terhadap kelompok tertentu memiliki pengaruh signifikan pada intoleransi politik (Fuadi & Saloom, 2020). Adat Minangkabau dan Islam mengalami proses akulturasi dalam bentuk sintesis yang bermakna budaya minang mengadaptasi nilai-nilai ajaran agama Islam (Aziz, Dzofir, & Wibowo, 2020). Adat basandi Syara', Syara' basandi kitabullah menjadi pedoman masyarakat minangkabau dalam hampir setiap keputusan dan sikap politik (Salim D. P., 2013).

Mahasiswa memiliki toleransi yang sedang (Rupande & Abigirl, 2015). Dalam bentuk pemilihan presiden misalnya, mahasiswa cenderung memilih toleransi politik berbentuk netralitas etik dan sikap saling menghormati pilihan politik (Supriyanto, Hartini, & Wahyudi, 2019). Namun mahasiswa dengan iklim sosial yang homogen cenderung memiliki toleransi yang lebih rendah (Ardi, Tobing, Agustina, Iswahyudi, & Budiarti, 2021).

Studi pada mahasiswa di Semarang menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai toleransi seperti sikap menghormati, kepedulian dan kebutuhan menjaga keragaman berpengaruh pada toleransi (Utomo & Wasino, 2020). Penelitian Witrianto pada mahasiswa fakultas ilmu budaya Universitas Andalas mengungkapkan bahwa mayoritas mahasiswa dalam penelitian menyatakan tidak membatasi diri dalam pergaulan atau jika harus bertetangga dengan kelompok identitas agama yang berbeda. Mayoritas mahasiswa dalam penelitian juga menyatakan ketidksetujuan sikap dalam bidang pernikahan dari kelompok agama yang berbeda dan dukungan untuk pemenuhan fasilitas kelompok agama minoritas (Witrianto, 2016).

Penelitian Ashadi pada mahasiswa Donn Bosco di kota Padang menyebutkan bahwa toleransi dan sikap militansi dapat muncul bersamaan tanpa saling melemahkan. Sikap toleran dalam hubungan pertemanan sementara sikap militansi tercermin dalam kesungguhan siswa mempelajari

agama dan kepercayaan masing-masing (Ashadi, 2020). Mahasiswa Universitas Negeri Padang sendiri memiliki indikator toleransi yang beragam; terbuka pada perbedaan, kesadaran untuk menghormati sesama, memberikan kebebasan beribadah dan mengedepankan timbal-balik positif antar individu maupun kelompok agama (Arjoni, Rahmat, Yusuf, & Ilfiandra, 2022).

Berbagai gerakan konservatisme agama dan adat dalam ranah politik terjadi di Sumatera Barat pasca reformasi seperti pemberlakuan perda syariat yang berlandaskan filosofi hidup Adat basandi Syara', Syara' basandi kitabullah yang menguatkan dominasi superioritas dari kelompok mayoritas dalam ranah elektoral (Zulfadli, Anggraini, & Fajri, 2020). Bentuk lainnya adalah pengutamaan pendidikan agama Islam sebagai kebijakan yang didukung oleh tokoh-tokoh agama sebagai pendorong perubahan sikap ketimbang menyediakan lapangan kerja (Salim & Kryati, 2018). Arus utama berusaha memenuhi berbagai kepentingan kelompok mayoritas dalam ranah politik elektoral dan hal ini membuka ruang intoleransi bagi kelompok minoritas.

Masyarakat yang egaliter tidak menimbulkan konflik karena pertama, masyarakat Minang yang rasional, kedua komunitas minang identik dengan Islam tidak menindas kelompok agama dan etnis lain, ketiga Islam merupakan dasar pemikiran berpolitik (Fahmi, Wira, & Aswirna, 2017). Dalam penelitian Laila K. Alfirdaus dan rekan sejawatnya menyebutkan bahwa relasi antaretnik etnis minangkabau dan etnis cina bergumul bersama stigma yang dibangun oleh para elit untuk kepentingan politik namun harmonis dalam hubungan perniagaan yang menimbulkan relasi simbiosis mutualisme (Alfirdaus, Hiariej, & Adeney-Risakotta, 2014) yang sejalan dengan hasil penelitian oleh Nafriandi menunjukkan harmonisasi hubungan etnis cina dan minangkabau dalam keadaan multikultural yang ditandai dengan ditinggalkannya penggunaan politik etnis diantara kedua kelompok etnis demi mewujudkan rasa kebangsaan dan ciri multi-etnis dalam bidang ekonomi (Nafriandi, 2016).

Dalam praktik dialog kelompok agama di Kabupaten Lima Puluh Kota, toleransi berjalan dengan baik dalam bidang pergaulan dan hubungan masyarakat. Toleransi tercermin dalam kehidupan masyarakat yang tidak membedakan kelompok agama dalam pertemanan. Tetapi dalam bidang pelaksanaan peribadatan, kelompok minoritas masih kekurangan fasilitas yang memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa toleransi berada pada ranah sosial, sementara ranah budaya, kelompok agama minoritas masih terus menyesuaikan dengan kepentingan kelompok mayoritas. Pembatasan ini mungkin muncul karena keyakinan kedua kelompok agama bahwa agama yang diyakini merupakan jalan keselamatan paling benar (Ajidin, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, terindikasi bahwa mahasiswa memiliki bentuk-bentuk toleransi politik yang luas mencakup sikap menghormati cara hidup orang lain seperti menghormati kepercayaan dan hak beribadah, sementara untuk bidang politik adalah dengan menghormati etis perbedaan pilihan pandangan politik meski dalam bentuk-bentuk toleransi yang pasif. Masyarakat umum memiliki toleransi politik seperti penghilangan prasangka etnis yang dibentuk elit politik untuk tujuan politis dalam bentuk kerjasama ekonomi maupun sikap menghormati dengan tanpa memilih dalam pertemanan. Dalam bidang politik, arus utama terindikasi untuk berusaha mendominasi dan kurang dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan politis kelompok diluar arus utama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Politik identitas agama digunakan masyarakat Minangkabau dalam bidang-bidang seperti mobilisasi politik, pembuatan kebijakan, ekonomi, dan relasi dalam lingkungan masyarakat yang multi-etnis. Toleransi masyarakat dan mahasiswa di Sumatera Barat meliputi toleransi kehidupan beragama yang menerima perbedaan, tetapi terindikasi adanya sentimen di ranah-ranah politik seperti pernikahan, pemenuhan kepentingan kelompok minoritas dan rentan, dan sentimen yang dibangun elit politik terhadap kelompok minoritas dan rentan yang artinya tidak terdapat perbedaan toleransi pada keduanya. Keterikatan pada filosofi hidup yang kuat terindikasi menjadi pedoman masyarakat dan mahasiswa di Sumatera Barat dalam mengambil sikap dalam berpolitik. Diperlukan studi-studi lebih jauh mengenai dampak penggunaan politik identitas agama dalam bidang yang lebih banyak agar dapat digambarkan dengan lebih akurat mengenai kompleksitas penggunaan politik identitas agama terhadap toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbarno, A. J. (2013). *The Behavioral Consequence of Political Tolerance*. University of Pittsburgh.
- Abbas, M. R. (2016). Ruang Publik dan Ekspresi Politik Identitas; (Studi Tentang Pergulatan Identitas Ke-Papua-an di Yogyakarta). *Jurnal Society*, Volume VI, Nomor I.
- Adelman, L., Verkuyten, M., & Yogeewaran, K. (2022). Distinguishing Active and Passive Outgroup Tolerance: Understanding Its Prevalence and the Role of Moral Concern. *Political Psychology* Vol. 43.
- Ajidin, Z. (2020). Praktik Dialog Antar Umat Beragama di Ranah Minang: Studi Pada Komunitas Islam-Kristen Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. *POROS ONIM: Journal of Social Religious* Volume 1 , Nomor 1.
- Alfirdaus, L. K., Hiarij, E., & Adeney-Risakotta, F. (2014). Politik Relasi Etnik: Matrilinealitas dan Etnik Minoritas Cina di Kota Padang, Sumatra Barat. *Jurnal Komunitas* Vol. 6.
- Ardi, R., Tobing, D. H., Agustina, G. N., Iswahyudi, A. F., & Budiarti, D. (2021). Religious schema and tolerance towards alienated groups in Indonesia. *Heliyon* 7.
- Arjoni, Rahmat, C., Yusuf, S., & Ilfiandra. (2022). Exploration of Student Religious Tolerance in Universitas Negeri Padang. *Journal of Islamic and Social Studies* Vol. 8.
- Ashadi, A. (2020). Toleransi dan Militan: Politik Relasi Antaragama Siswa Muslim Kota Padang. *RELIGI: Jurnal Studi-Studi Agama* Vol. 16 No. 1.
- Aziz, E., Dzofir, M., & Wibowo, A. (2020). The Acculturatuin of Islam and Customary Law: an Experience of Minangkabau, Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* Vol. 8, No. 1.
- Azmi, R., & Kumala, A. (2019). Multicultural Personality pada Toleransi Mahasiswa. *Tazkiya*.
- Boote, D., & Beile, P. (2005). *Scholars before Researchers: On the Centrality of the Dissertation Literature Review in Research Preparation*. Educational Researcher.
- Cottam, M. L., Dietz-Uhler, B., Mastors, E., & Preston, T. (2012). *Pengantar Psikologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dege, M. (2014). Identity Politics. Dalam T. Teo, *Encyclopedia of Critical Psychology* (hal. 933-1025). New York, NY: Springer.
- Dijker, A. J., & Koomen, W. (2007). *Stigmatization, Tolerance and Repair*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Effendi, N. (2014). Budaya Politik Khas Minangkabau Sebagai Alternatif Budaya Politik di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, Vol. 40 (1), 75-88.
- Erikson, E. H. (1980). *Identity and the life cycle*. W W Norton & Co.
- Fahmi, R., Wira, A., & Aswirna, P. (2017). *identity and Social Conflict in West Sumatera (Study on General Election of President 2019)*. Musawa, vol. 16.
- Faucher, C. (2007). *Contesting Boundaries in the Riau archipelago . Renegotiating Boundaries: Local Politics in post-Suharto Indonesia*.
- Fearon, J. D. (1999). *What Is Identity . Department of Political Science*, 35-37.
- Fink, A. (2010). *Conducting research literature reviews: From the Internet to paper (3rd ed.)*. Sage Publications, Inc.
- Flippen, A. R., Hornstein, H. A., Siegal, W. E., & Weitzman, E. A. (1996). A Comparison of Similarity and Interdependence as Triggers for In-Group Formation. *Personality and Social Psychology Bulletin*.

- Fuadi, M. N., & Saloom, G. (2020). Persepsi Keterancaman, Fundamentalisme dan Kebencian terhadap Intoleransi Politik. *Jurnal Penelitian Psikologi*.
- Galvan, J. L. (2017). *A guide for students of the social and behavioral science* 6th edition. New York: Routledge.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 116-134.
- Hamidah, K. (2018). The Trend of Emerging Identity Politics in Indonesia and the Challenge in Fostering Social Cohesion: Lesson Learned from Jakarta Provincial Election. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* Vol. 26 No.1, 91-109.
- Hanifia. (2018). Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Jurnal Studi Agama-Agama* ISSN 2089-8835 Volume 1 Nomor 1, 34-47.
- Hart, C. (1998). *Doing Literature Review: Releasing the Social Research Imagination*. Sage.
- Hazama, Y. (2010). Determinants of Political Tolerance: A Literature Review. *Ide Discussion Paper* No. 288.
- Hebbelstorp, S., & Rasmussen, R. (2015). Cognitive Ability, Principled Reasoning and Political Tolerance. *Annual Midwest Political Science Association Conference*.
- Heller, A. (2001). *Cultural Memory, Identity and Civil Society*.
- Hospita, W., Zetra, A., & Afrizal. (2018). Framing Gerakan Forum Masyarakat Minangkabau dan Advokasi Kebijakan Investasi di Kota Padang: Kasus PT. Lippo Tbk. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 1.
- Huddy, L. (2001). From Social to Political Identity: A Critical. *Political Psychology*, Vol. 22, No. 1.
- Institute, I. (2018). *Indeks Kota Toleran (IKT) 2018*. Indeks.
- Institute, S. (2015). *Indeks Kota Toleran (IKT) 2015*. Setara Institute.
- Institute, S. (2017). *Indeks Kota Toleran (IKT) 2017*. Setara Institute.
- Islam, G. (2014). *Encyclopedia of critical psychology*. Verlag: Springer.
- KBBI. (2021). <https://kbbi.web.id/mahasiswa>. Diambil kembali dari Kamus Bahasa Indonesia Online: <https://kbbi.web.id/mahasiswa>
- Kubin, E., Gray, K. J., & Sikorski, C. v. (2023). Reducing Political Dehumanization by Pairing Facts With Personal experiences. *Political Psychology* Vol. 44.
- Kusnandar, V. B. (2019, 05 25). *Katadata.co.id*. Diambil kembali dari *Katadata*: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>
- Lestari, D. (2019). *Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia*. *Simulacra* Vol. 2.
- Machi, L., & McEvoy, B. (2016). *The Literature Review: Six Steps to Succes*. Corwin Press.
- Muhtadi, B. (2018). Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional. 68-86.
- Nafriandi. (2016). *Multikultural Ranah Miang: Interaksi Sosial dan Eksistensi Etnis Cina Padang*. *Jurnal Penelitian & Pengabdian* Vol. 4.
- Oberdiek, H. (2001). *Tolerance*. Rowman & Littlefield Publisher.
- Peterson, J. R. (2020). *Religiosity and Political Tolerance: Releasing the Relationship*.

- Rahmat, A. (2011). Reaktualisasi Nilai Islam dalam Budaya Minangkabau Melalui Kebijakan Desentralisasi. *El-Harakah*, vol. 13, no. 1.
- Ridley, D. (2012). *The Literature Review* 2nd edition. London: SAGE.
- Romli, L. (2019). Political Identity and Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science*, 78-98.
- Rupande, G., & Abigirl, S. (2015). Challenges of Cultivating Religious and Political Tolerance in Institutions of Higher Learning. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education* Vol. 2.
- Salim, D. P. (2013). Islam, Politics and Identity in West Sumatera. *Journal of Indonesian Islam* vol 7.
- Salim, D. P., & Kryati, L. (2018). Politik Pendidikan Agama dan Perubahan Prilaku di Sumatera Barat. *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 2.
- Supriyanto, A., Hartini, S., & Wahyudi, A. (2019). What is the Character of Student Tolerance in the Indonesian Political Situation?
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of inter-group conflict. *The social psychology of inter-group relations* , 33–47.
- Tenenbaum, H., Capelos, T., Lorimer, J., & Stocks, T. (2018). Positive Thinking Elevates Tolerance: Experimental Effects of Happiness on Adolescents' Attitudes Toward Asylum Seekers. *Clinical Child Psychology and Psychiatry* Vol 23.
- Trinugraha, Y. H. (2013). Politik Identitas Anak Muda Minoritas: Ekspresi Identitas Anak Muda Tionghoa melalui Dua Organisasi Anak Muda Tionghoa di Surakarta Pasca Orde Baru. *Jurnal Studi Pemuda* , 172-186.
- Utomo, C. B., & Wasino. (2020). 1. an Integrated Teaching Tolerance in Learning History of Indonesian National Movement at Higher Education. *Islamic Insights Journal* Vol. 3.
- Witrianto. (2016). Toleransi Antarumat Beragama dalam Pandangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* Vol. 2.
- Wittenberg, R. T. (2019). *The Psychology of Tolerance*. Singapore: Springer.
- Yandra, A. (2017). Politik Etnisitas Dalam Pemilu Kada (Studi Kasus Dalam Pelaksanaan Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati di Pasaman Provinsi Sumatera Barat).
- Zulfadli, Z., Anggraini, D., & Fajri, M. (2020). From Formalization of Sharia to Islamic Conservatism: The Post Reform of Islamic Movement Phenomena in West Sumatra. *Open Journal System* Vol. 1